

**KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH, KETIMPANGAN
ANTAR WILAYAH DAN PROSPEK EKONOMI
ANTAR PROVINSI DI SUMATERA**



Tesis Oleh:

DEDE MARDHIAN

NIM 01022681923001

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Magister

Pada

Program Sudi Magister Ilmu Ekonomi

BKU Ilmu Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
JULI 2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tesis : Kemandirian Fiskal Daerah, Ketimpangan Antar Wilayah
dan Prospek Ekonomi Antar Provinsi di Sumatera
Nama Mahasiswa : Dede Mardhian
NIM : 01022681923001
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi
BKU/Konsentrasi : Ilmu Ekonomi

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

Pembimbing Kedua,



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

Koordinator Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015



Dekan, KEBUDAYAAN DAN HUMANIORA
Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya,
Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E
NIP. 196706241994021002

Tanggal Lulus: 24 Juli 2023

(Tanggal lulus ujian tesis)



**KEMENTERIAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**


Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km. 32 Inderalaya (Ogan Ilir) Kode Pos 30662


Tel: (0711) 580964, 580646 Fax(0711) 580964


Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139


Laman: <http://fe.unsri@unsri.ac.id> email : dekan@fe.unsri.ac.id

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si ()
NIP. 197007162008012015

Sekretaris : Dr. Mukhlis, S.E., M.Si ()
NIP. 197304062010121001

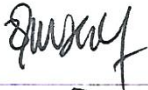

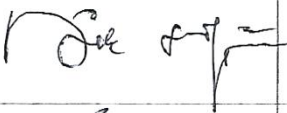
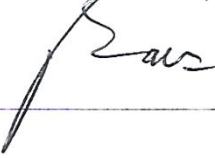
Anggota : (1) Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si ()
NIP.196007101987031003

(2) Dr. Sukanto, S.E., M.Si ()
NIP. 197304062010121001



**BUKTI TELAH MEMPERBAIKI TESIS
MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si		Juli 2023
2.	Dr. Mukhlis, S.E., M.Si		Juli 2023
3.	Prof. Dr. H. Didik Susetyo. M.Si		Juli 2023
4.	Dr. Sukanto, S.E., M.Si		Juli 2023

Menerangkan bahwa:

Nama : Dede Mardhian
NIM : 01022681923001
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi
Bidang Kajian : Ilmu Ekonomi
Judul Tesis : Kemandirian Fiskal Daerah, Ketimpangan Antar Wilayah
dan Prospek Ekonomi Antar Provinsi di Sumatera

Telah memperbaiki tesis hasil ujian.

Palembang, Juli 2023
Mengetahui,
Koordinator Program Studi



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Dede Mardhian
NIM : 01022681923001
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi
Bidang Kajian Utama : Ilmu Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang berjudul:

Kemandirian Fiskal Daerah, Ketimpangan Antar Wilayah dan Prospek Ekonomi
Antar Provinsi di Sumatera

Pembimbing I : Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
Pembimbing II : Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
Tanggal Ujian : 24 Juli 2023

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam Tesis ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar.

Palembang, Juli 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Dede Mardhian
NIM. 01022681923001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Kemandirian Fiskal Daerah, Ketimpangan Antar Wilayah dan Prospek Ekonomi Antar Provinsi di Sumatera”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Magister Sains Program Strata Dua (S-2) Bidang Kajian Utama Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Selama penelitian dan penyusunan tesis ini tentu tidak luput dari berbagai kendala dan kesulitan, namun dengan adanya bantuan, bimbingan, petunjuk dan nasihat dari berbagai pihak akhirnya tesis ini dapat diselesaikan, semoga tesis ini memberikan manfaat bagi pembaca.

Palembang, Juli 2023

Dede Mardhian

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama proses penyusunan tesis ini tidak sedikit hambatan yang dihadapi penulis, tetapi berkat bantuan, bimbingan dan motivasi yang diberikan oleh berbagai pihak maka penulis dapat menghadapi kendala dalam penyelesaian penelitian. Maka dari itu, dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Mohamad Adam, S.E., M.E, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dr. Anna Yulianita, S.E, M.Si selaku Pembimbing Pertama sekaligus Ketua Prodi Magister Ilmu Ekonomi dan Bapak Dr. Mukhlis, S.E, M.Si selaku Pembimbing Kedua yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membantu serta memberikan saran dalam penyelesaian tesis ini.
4. Almarhum Bapak Prof. H. Syamsurijal AK. Ph,D selaku pembimbing proposal tesis yang telah mengorbankan waktu, pikiran dan memberikan ilmunya pada penyusunan proposal tesis.
5. Bapak Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si dan Dr. Sukanto, S.E, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran membangun guna penyelesaian tesis ini.
6. Semua Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

7. Kepala, Sekretaris dan Staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir yang telah memberikan izin, semangat dan motivasi.
8. Ayah, Ibu, Kakak dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta doa yang tiada hentinya.
9. Resti Setyo Anggraini S.Si yang selalu memberikan do'a, dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini hingga tuntas.
10. Serta kepada teman-teman Program Studi Magister Ilmu Ekonomi angkatan 2019 yang telah menemani dan saling mendukung selama masa perkuliahan.

Palembang, Juli 2023

Dede Mardhian

ABSTRAK

Kemandirian Fiskal Daerah, Ketimpangan Antar Wilayah Dan Prospek Ekonomi Antar Provinsi Di Sumatera

Oleh:

Dede Mardhian; Anna Yulianita; Mukhlis

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemandirian fiskal dan ketimpangan wilayah di Pulau Sumatera kemudian dikaitkan pada sektor prospektif pada setiap provinsi di Pulau Sumatera. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 2013-2020 yang diperoleh dari hasil publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Penelitian ini menggunakan pendekatan Indeks Kemandirian Fiskal, Indeks Williamson, *Location Quotient*, *Dynamic Location Quotient* dan Model Rasio Pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa provinsi di Pulau Sumatera belum ada yang masuk dalam kategori Mandiri dan secara keseluruhan masih masuk ke dalam kategori IKF Menuju Mandiri. Kemudian dari analisis Indeks Williamson diketahui dari 10 provinsi di wilayah Pulau Sumatera, 1 diantaranya mengalami ketimpangan pada kategori tinggi, 4 provinsi mengalami ketimpangan kategori sedang dan 5 provinsi mengalami ketimpangan kategori rendah. Adapun sektor yang menjadi keunggulan dan memiliki prospek di masa depan yang dimiliki sebagian besar provinsi di Wilayah Sumatera adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta sektor Real Estate.

Kata Kunci: Kemandirian Fiskal, Ketimpangan, Basis Ekonomi, Prospek Ekonomi, Sektor Potensial

Pembimbing Pertama,



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

Pembimbing Kedua,



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

Mengetahui,
Koordinator Prodi Magister Ilmu Ekonomi



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

ABSTRACT

Regional Fiscal Autonomy, Inequality And Economic Prospects Between Provinces In Sumatra

By:

Dede Mardhian; Anna Yulianita; Mukhlis

This study aims to identify fiscal autonomy and regional inequality on the island of Sumatra and then link it to the prospective sector in each province on the Sumatra Island. Data used in this study are secondary data from the year 2013-2020 obtained from the publication of the Central Bureau of Statistics (BPS) and Directorate General of Financial Equalization (DJPk). This study uses the Fiscal Autonomy Index approach, the Williamson Index, Location Quotient, Dynamic Location Quotient and Growth Ratio Model. The results showed that none of the provinces on Sumatra Island were included in the Independent category and as a whole were still included in the FAI Towards Independence category. Then from the Williamson Index analysis it is known that out of 10 provinces in the Sumatra Island region, 1 of them experiences inequality in the high category, 4 provinces experience medium category inequality and 5 provinces experience low category inequality. The sectors that are superior and have future prospects owned by most provinces in the Sumatra Region are the Agriculture, Forestry and Fishing sectors, the Wholesale and Retail Trade sectors; Car and Motorcycle Repair and Real Estate Activities sector.

Keywords: Fiscal Autonomy, Inequality, Economic Base, Economic Prospects, Potential Sectors

Advisor I,



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

Advisor II,



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

Head of The Study Program



Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Teori Biaya.....	9
2.1.1 Teori Pengeluaran Pemerintah.....	9
2.1.2 Desentralisasi Fiskal.....	13
2.1.3 Ketimpangan.....	16
2.1.4 Teori Basis Ekonomi.....	22
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Pemikiran.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	34
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	34

3.3 Teknik Analisis	34
3.3.1 Indeks Kemandirian Fiskal	35
3.3.2 Indeks Williamson	36
3.3.3 <i>Location Quotient</i>	37
3.3.4 <i>Dynamic Location Quotient</i>	38
3.3.5 Model Rasio Pertumbuhan	39
3.3.6 Analisis <i>Overlay</i>	42
3.4 Definisi Operasional Variabel	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	44
4.1.1 Kondisi Geografis Wilayah Pulau Sumatera.....	44
4.1.2 Kontribusi Wilayah Sumatera Terhadap Indonesia	46
4.1.2.1 Provinsi Aceh	47
4.1.2.2 Provinsi Sumatera Utara.....	47
4.1.2.3 Provinsi Sumatera Barat	48
4.1.2.4 Provinsi Riau	49
4.1.2.5 Provinsi Jambi	50
4.1.2.6 Provinsi Sumatera Selatan.....	51
4.1.2.7 Provinsi Bengkulu	52
4.1.2.8 Provinsi Lampung	53
4.1.2.9 Provinsi Bangka Belitung.....	54
4.1.2.10 Provinsi Kepulauan Riau.....	55
4.1.3 Indeks Kemandirian Fiskal	56
4.1.4 Analisis Indeks Williamson	58
4.1.5 Analisis Kuadran	60
4.1.6 Prospek Ekonomi	63
4.1.6.1 <i>Location Quotient</i>	63
4.1.6.2 <i>Dynamic Location Quotient</i>	65
4.1.6.3 Model Rasio Pertumbuhan.....	68
4.1.6.4 Analisis <i>Overlay</i>	69
4.2 Pembahasan.....	72

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	88

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Klasifikasi Kemandirian Fiskal Daerah	16
Tabel 4.1 Luas Wilayah Pulau Sumatera	45
Tabel 4.2 Indeks Kemandirian Fiskal Provinsi di Wilayah Sumatera.....	56
Tabel 4.3 Indeks Williamson Provinsi di Wilayah Sumatera 2013-2020.....	58
Tabel 4.4 Sektor Unggulan Provinsi di Wilayah Sumatera berdasarkan LQ..	63
Tabel 4.5 Sektor potensial provinsi di Wilayah Sumatera berdasarkan DLQ	66
Tabel 4.6 Hasil Analisis MRP di Wilayah Sumatera.....	68
Tabel 4.7 Analisis <i>Overlay</i> Sektor Lapangan Usaha Pulau Sumatera	71

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1.1 Rata-Tata Ketimpangan Provinsi di Sumatera Tahun 2011-2022.	2
Grafik 1.2 PAD Provinsi di Sumatera Tahun 2018-2021	5

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner	10
Gambar 2.2 Teori Peacock dan Wisman.....	11
Gambar 2.3 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	12
Gambar 2.4 Kurva Lorenz.....	19
Gambar 2.5 Kerangka pemikiran	32
Gambar 4.1 Peta Wilayah Pulau Sumatera	45
Gambar 4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Sumatera	46
Gambar 4.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh.....	47
Gambar 4.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara	48
Gambar 4.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat	49
Gambar 4.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau.....	50
Gambar 4.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi.....	51
Gambar 4.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan	52
Gambar 4.9 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu.....	53
Gambar 4.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung.....	54
Gambar 4.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bangka Belitung	54
Gambar 4.12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau	55
Gambar 4.13 Indeks Kemandirian Fiskal Pulau Sumatera	57
Gambar 4.14 Indeks Williamson Pulau Sumatera	60
Gambar 4.15 Kuadran Kartesius	61

BAB I

PENDAHULUAN

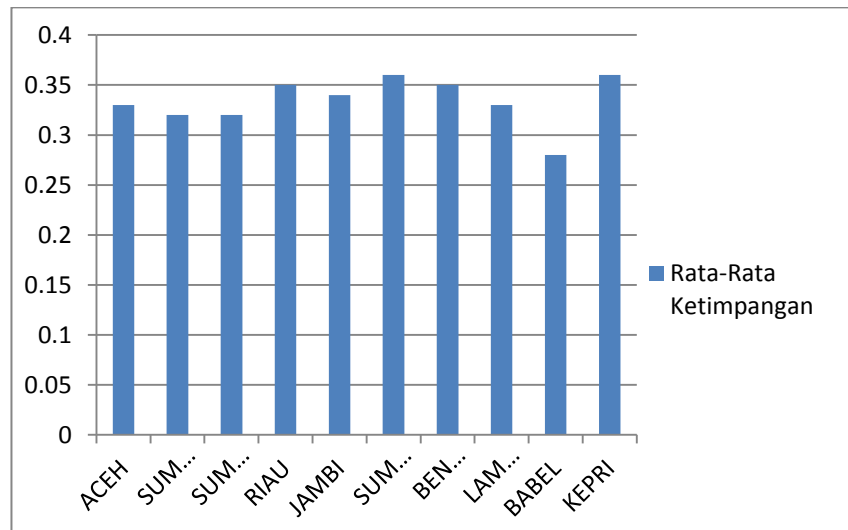
1.1 Latar Belakang

Isu tentang kesenjangan sudah lama menjadi perhatian pemerintah, terlebih pada era Orde Baru yang dalam pembangunannya berpedoman pada Trilogi Pembangunan yang mengedepankan aspek pemerataan. Namun, dalam proses pembangunan tersebut tak jarang terjadi masalah seperti adanya kesenjangan ekonomi.

Pembangunan yang telah dilakukan kebanyakan lebih condong ditujukan untuk pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi, bukan peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Artinya tingkat pertumbuhan yang tinggi tidak diimbangi dengan tingkat pemerataan distribusi hasil pembangunannya. Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila suatu daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata (Fitriyah, 2013).

Pulau Sumatera merupakan pulau terbesar ketiga yang letaknya di bagian barat Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa dan terdiri atas 10 provinsi meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung menjadikan Pulau Sumatera sebagai pulau dengan provinsi terbanyak. Kesepuluh provinsi tersebut tentu memiliki perbedaan kondisi geografis dan sumber daya yang membawa pengaruh terhadap perbedaan perekonomian serta

kesejahteraan masyarakat di masing-masing provinsi, berikut ini adalah rata-rata ketimpangan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera yang diukur menggunakan Gini Ratio pada periode tahun 2011-2022.



Grafik 1.1 Rata-Rata Ketimpangan Provinsi-Provinsi di Sumatera Tahun 2011-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik

Menurut Todaro (2009) wilayah yang distribusi pendapatannya sangat timpang berada di antara 0,50 sampai 0,70 sedangkan bagi wilayah yang distribusi pendapatannya relatif merata berada di antara 0,20 sampai 0,35. Pada Grafik 1.1, dapat dilihat bahwa terdapat empat provinsi yang distribusi pendapatannya dikatakan tidak merata yakni Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Kepulauan Riau, sedangkan rata-rata tingkat ketimpangan yang paling rendah adalah Provinsi Bangka Belitung dengan nilai 0,28 persen. Dapat dikatakan ketimpangan di Pulau Sumatera tergolong rendah namun bila hal ini tidak diperhatikan bukan tidak mungkin ketimpangan di wilayah Pulau Sumatera akan semakin parah dan akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sjafrizal (2012), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah diantaranya adalah (1) perbedaan sumber daya alam; (2) faktor demografis termasuk kondisi tenaga kerja; (3) alokasi dana pembangunan antar wilayah baik investasi pemerintah maupun investasi swasta; (4) konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan (5) mobilitas barang dan jasa.

Potensi sumber daya dan keadaan geografis yang berbeda pada tiap-tiap wilayah menjadi dasar penyebab terjadinya ketimpangan. Akibatnya, kemampuan suatu wilayah untuk menjalankan proses pembangunan juga berbeda, hal tersebut dapat membuat suatu daerah terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang. Adanya ketimpangan antar wilayah juga akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Oleh sebab itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah juga memiliki keterkaitan terhadap formula pada kebijakan pembangunan wilayah yang dibuat oleh pemerintah daerah (Fajrii, 2016).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yakni melalui penerapan desentralisasi dan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan, kemudian juga pengelolaan anggaran negara dengan desentralisasi fiskal karena masing daerah lah yang paling mengenal karakteristik wilayahnya sehingga dapat melakukan pembangunan sesuai apa yang masing-masing dari mereka butuhkan. Menurut Akai dan Sakata (2005) desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah, sudut pandang desentralisasi fiskal menyangkut manfaat efisiensinya, tentang

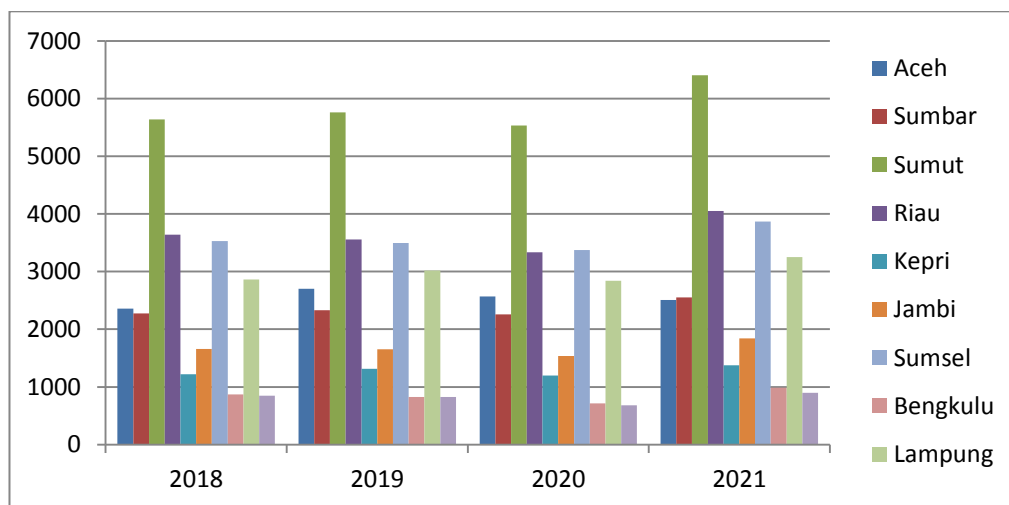
bagaimana pengelolaan anggaran dari desentralisasi kebijakan publik yang efisien bagi daerah sehingga daerah tersebut dapat keluar dari kemiskinan dengan usaha mereka sendiri. Jika ini bertahan, ketimpangan daerah bisa menjadi lebih kecil setelah desentralisasi fiskal.

Harapan dilaksanakannya otonomi daerah atau disentralisasi adalah pemerintah daerah akan lebih fleksibel dalam mengatur strateginya, karena dengan desentralisasi pemerintah akan lebih dekat dengan masyarakatnya, sehingga makin banyak keinginan masyarakat dapat dipenuhi oleh pemerintah. Dengan desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kemakmuran seluruh masyarakat pada masa yang akan datang (Swandewi, 2014).

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, daerah semestinya memiliki kemampuan kemandirian fiskal daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan untuk dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerah, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan, dan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah (PAD) menjadi sumber keuangan. Semakin mandiri suatu daerah akan semakin leluasa dalam melakukan pembangunan ekonomi (Nurhayati, 2015).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi menandakan otonomi daerah yang dilaksanakan berjalan dengan baik. Setiap daerah memiliki PAD berbeda-beda karena potensi yang dimiliki setiap daerah berbeda. Semakin tingginya PAD suatu daerah dapat mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap Dana

Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditentukan dari obyek pajak dan retribusi, sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat apabila PAD meningkat dan kesejahteraan masyarakat daerah meningkat (Adriani dan Yasa, 2015).



Grafik 1.2 Pendapatan Asli Daerah Provinsi-Provinsi di Sumatera Tahun 2018-2021

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK)

Grafik 1.2 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi-Provinsi Pulau Sumatera mengalami fluktuasi, terutama pada tahun 2020 yang secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena lesunya perekonomian akibat dari Pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2021 PAD Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera berangsur meningkat secara keseluruhan. Provinsi yang memiliki nilai PAD tertinggi di Pulau Sumatera adalah Provinsi Sumatera Utara sedangkan pemilik nilai PAD terendah adalah Provinsi Bangka Belitung.

PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah dan menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah, di samping itu PAD juga mencerminkan kemandirian suatu daerah (Syahrial dan Sotuyo, 2014).

Namun yang perlu diperhatikan juga bukan hanya bagaimana PAD dapat terus meningkat tetapi juga bagaimana potensi ekonomi daerah yang dapat menumbuhkan ekonomi daerah. Menurut Haryanto (2018) beberapa daerah yang dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah justru mengalami kemunduran dalam di beberapa sektor akibatnya kekayaan sumber daya alam tersebut tidak mampu mensejahterakan masyarakatnya, jadi yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana terciptanya aspek kemandirian daerah sekaligus prospek ekonomi bagi daerah yang dikaruniai kekayaan sumber daya alam. Kemudian menurut Hajeri (2015) pelaksanaan otonomi daerah dengan pemberdayaan potensi daerah akan bisa berjalan jika sektor unggulan daerah dapat dioptimalkan, dimana sektor unggulan ini penting untuk menentukan skala prioritas dalam pembangunan.

Meskipun otonomi daerah telah dijalankan dengan baik namun perlu dikaji lagi seberapa besar tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat, tingkat kemandirian daerah harus berjalan beriringan dengan tingkat ketimpangan yakni tingkat kemandirian meningkat dan tingkat ketimpangan menurun. Beberapa daerah di Sumatera juga masih ada yang belum memiliki kemandirian fiskal yang baik dan masih memiliki ketergantungan yang cukup

besar terhadap dana transfer pemerintah pusat. Selain itu pada kajian ini dikaitkan pula dengan prospek ekonomi sebagai tonggak arah pembangunan daerah. Pada dasarnya, pemerintah menginginkan terjaminnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya melalui berbagai strategi pembangunan dan pemerataan dalam perekonomian, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kemandirian Fiskal Daerah, Ketimpangan Antar Wilayah dan Prospek Ekonomi antar Provinsi di Sumatera”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Kemandirian Fiskal Daerah, Ketimpangan Antar Wilayah dan Prospek Ekonomi antar Provinsi di Sumatera ?.

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah menganalisis Kemandirian Fiskal Daerah, Ketimpangan Antar Wilayah dan Prospek Ekonomi antar Provinsi di Sumatera.

1.4. Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan referensi bagi dunia akademik terutama ilmu ekonomi maupun masyarakat secara luas yang ingin mengetahui tingkat kemandirian fiskal, ketimpangan dan prospek ekonomi di wilayah Pulau Sumatera.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak kajian empiris yang berkaitan dengan kemandirian fiskal, ketimpangan dan prospek ekonomi serta dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pihak yang ingin mengkaji permasalahan ini.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu ekonomi serta dapat menjadi acuan dan referensi bagi akademis secara umum untuk dikembangkan pada penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah dan pihak terkait di Indonesia mengenai kemandirian fiskal daerah, ketimpangan dan prospek ekonomi di wilayah Pulau Sumatera.
2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada kepala daerah di wilayah Pulau Sumatera untuk dijadikan bahan pertimbangan dan masukan dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kemandirian fiskal daerah, ketimpangan antar wilayah dan prospek ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya. 2020. *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Hal.1-10.
- Adiyatin, Dini dkk. 2019. *Analisis Overlay Untuk Menentukan Potensi Sektor Ekonomi Unggulan Dalam Pembangunan Daerah (Studi Kasus dengan PDRB Kota Pontianak)*. Buletin Ilmiah Mat. Stat. Dan Terapannya (Bimaster). Vol.8, No.4. Hal.959-968.
- Adriani, Ni Luh Gede Cintya dan I Nyoman Mahaendra Yasa. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Pengangguran Melalui Belanja Tidak Langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*. E-Jurnal EP Universitas Udayana. Vol.4 No.10. Hal.1328-1356.
- Aji, Maulana Malik Sebdo dan Nuri Nasriyah. 2020. *Sektor Unggulan Di Era Pandemi Covid 19 Wilayah Regional Sumatera*. Jurnal Parameter. Vol. 6, No. 11. Hal. 36-54.
- Akai, Nobuo and Masayo Sakata. 2005. *Fiscal Decentralization, Commitment, and Regional Inequality: Evidence fram Statel-level Cross-sectional Data for the United States*. CIRJE Discussion Papers. p.1-28.
- Arezda, Bryhan. 2017. *Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Pendapatan dan Kemandirian Daerah Tehadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2015*. (Tesis). Palembang: Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.
- Basuki, Agus Tri dan Utari Gayatri. 2009. *Penentu Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol.10, No.1. Hal.34-50.
- BPS. Statistik Indonesia Berbagai Edisi. Badan Pusat Statistik
- BPK. 2020. Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirain Fiskal Pemerintah Daerah.
- Darzal. 2016. *Analisis Disparitas Pendapatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Provinsi Jambi*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah. Vol.4, No.2. Hal.131-142.

- Ezcurra, Roberto and Pedro Pascual. 2008. *Fiscal Decentralization And Regional Disparities: Evidence From Several European Union Countries*. Environment and Planning Journal. Vol.40. p.1185-1201.
- Fajrii, Muhammad, Arman Delis dan Yohanes Vyn Amzar. 2016. *Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera*. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan. Vol.9 No.2. Hal.99-107.
- Fitriyah, Lailatul dan Lucky Rachmawati. 2013. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Daerah Serta Hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Gerbangkertosusila Provinsi Jawa Timur*. E-Journal Unesa. Hal.1-16.
- Hajeri et al. 2015. *Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian di Kabupaten Kubu Raya*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan. Vol. 4, No. 2, Hal. 253-269.
- Haryanto, Joko Tri. 2018. *Kemandirian Daerah Dan Prospek Ekonomi Wilayah Kalimantan*. Indonesian Treasury Review. Vol.3, No.4. Hal.312-328.
- Icwanudin, Wawan dan Sugeng Setiadi. 2019. *Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Melalui Pengembangan Potensi Daerah Di Kabupaten Lebak*. Tirtayasa EKONOMIKA. Vol. 14, No 2. Hal. 282-292.
- Iyan, Ritayani. 2014. *Analisis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Di Wilayah Sumatera*. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan. No.11. Hal.215 -235.
- Kiton, Mario Andrias. 2019. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Ilmiah Smart. Vol. III, No.2. Hal.68 – 80.
- Landiyanto, Erlangga Agustino. 2005. *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya*. CURES Working Paper. No.05/01. Hal.1-16.
- Larasati, Dinda dan Riko Setya Wijaya. 2022. *Peran sektor basis dalam mengurangi disparitas pendapatan di Kawasan Subosukawonosraten Provinsi Jawa Tengah*. e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah. Vol. 11. No. 2. Hal. 113-126.
- Machmud, Amir. 2016. *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Erlangga.
- Mangkusubroto, Guritno. 2001. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Meliza dan Murtala. 2020. *Analisis Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Aceh*. Jurnal Ekonomi Regional Unimal. Vol.3, No.1. Hal.27-38

- Miyasto, Lintangia Fajar Apriesa. 2013. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus : Kabupaten / Kota Jawa Tengah)*. Diponegoro Journal Of Economics. Vol.2 No.1. Hal.1-12.
- Modes, Jeberta Tefilah dan Rini Nurul Hidayah. 2021. *Analisis Sektor Unggulan di Provinsi Kalimantan Barat*. Forum Analisis Statistik. Vol. 1, No. 1. Hal. 25-35.
- Musgrave, R., & Musgrave, P. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). Singapore: McGraw-Hill.
- Noviar. 2021. *Analisis Ketimpangan Dan Klasifikasi Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2016-2020*. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah. Vol.5, No.1, Hal. 24-33.
- Nurhayati, Mafizatun. 2015. *Pengaruh Kemandirian Daerah, Investasi Pemerintah, Angkatan Kerja dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di 33 Provinsi Tahun 2008 – 2013*. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis. Vol.1 No.3. Hal.1-16.
- Prastya, Hendra dkk. 2018. *Pengaruh Sektor Primer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi Di Pulau Sumatera*. JEP. Vol. 7, No.1. Hal. 1-23.
- Putra, Gusti Andre Kharisma dan Endah Saptutyingsih. 2017. *Analisis Sektor Ekonomi Potensial dan Unggulan dalam Penentuan Kebijakan Pembangunan Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011-2015*. JERSS. Vol. 1, No.2. Hal.130-143.
- Rajab, Abdul dan Jamaludin Kamarudin. 2021. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Wilayah Dan Tingkat Kemiskinan*. Forum Ekonomi, Vol.23, No.4. Hal.607-613.
- Restiatun. 2009. *Identifikasi Sektor Unggulan dan Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol.10, No.1, Hal.77-98.
- Rini, Okni Sari Pinda dan Rifki Khoirudin. 2020. *Analisis Sektor Unggulan Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2016*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis. Vol. 17. No.1, Hal.15-23.
- Rosmeli dan Nurhayan. 2014. *Studi Komperatif Ketimpangan Wilayah Antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia*. Mankeu. Vol.3. No.1. Hal.374-463.

- Rusdi, Muhammad et al. 2018. *Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2012 -2016*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik. Vol.1, No.2, Hal.49-64.
- Sianturi, Monika Karolina dan Ahmad Albar Tanjung. 2020. *Pengaruh Sektor Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Dairi*. Journal of Business and Economics Research. Vol.1, No.3. Hal.266-275.
- Sidik, M. (2002). *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Kompas.
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Regional*. Padang: Badouse Media.
- Suhandi, dan Nisrina Hakin. 2021. Analisis Overlay Sektor Unggulan Provinsi Banten. Jurnal Bina Bangsa Ekonomika. Vol.14. No.2. Hal.268-280
- Supriadi, Agus. 2022. *Analisis Potensi Sektor Basis Dan Non Basis Kabupaten Payakumbuh Tahun 2018-2021*. AL-IJTIMA`I. Vol. 8, No.1. Hal.1-10.
- Suwarno, Elva Afria dan Sishadiyati. 2022. *Penentuan Sektor Ekonomi Unggulan dengan Analisis Overlay di Kota Surabaya*. Jurnal Ekombis Review. Vol.10 No.2. Hal. 619-628.
- Swandewi, Anak Agung Istri Agung. 2014. *Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Keserasian Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Vol.3 No.7. Hal.356-376.
- Syahrial dan Sotuyo. 2014. *Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Lhokseumawe*. Jurnal Kebangsaan. Vol.3 No.5. Hal.20-28.
- Takalumang, Vicky Y et al. 2018. *Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kepulauan Sangihe*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol.18, No.01, Hal.1-12.
- Tarigan, Robinson. 2012. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P. 2009. *Pembangunan Ekonomi*. (Edisi ke-11). Terjemahan oleh Agus Dharma. Jakarta: Erlangga.
- Tutupoho, Ali. 2019. *Analisis Sektor Basis Dan Sektor Non Basis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku (Studi Kasus Kabupaten Kota)*. Cita Ekonomika. Vol. XIII, No. 1. Hal. 1-18.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta.

Wahyudi, Heru dan Farida Aliyatul Asy'ariati. 2022. *Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung*. Jaspispol. Vol 1, No 2. Hal.143-155.

Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Yeniwati. 2013. *Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi Di Sumatera*. Jurnal Kajian Ekonomi. Vol. II, No. 03. Hal. 1-21.

Yulyanti, Sinta dan Poppy Camenia Jamil. 2021. *Analisis Disparitas Pembangunan di Provinsi Riau*. Jurnal Ekonomi Kiat. Vol.32, No.2. Hal.108-115.

Yusuf, Maulana. 1999. *Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Sebagai Salah Satu Alat Analisis Alternatif Dalam Perencanaan Wilayah Dan Kota (Aplikasi Model: Wilayah Bangka-Belitung)*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Vol. XLVII, No.2. Hal.219-233.

Yuwono, Prpto. 1999. *Penentuan Sektor Unggulan Daerah Menghadapi Implementasi UU 22/1999 dan UU 25/1999*. Kritis. Volume XII. Salatiga.

[http://: www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)